RESPON *AMNESTY INTERNATIONAL* TERHADAP TINDAKAN REPRESIF PEMERINTAH TERKAIT PENOLAKAN *CITIZENSHIP AMENDMENT ACT* DI INDIA TAHUN 2019

Nur Fatimah[1]

Abstract: *In 2019 the Indian government amended the Citizenship Act 1955 which was named the Citizenship Amendment Act 2019 (CAA 2019) which contains about illegal immigrants who are Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian from Afghanistan, Bangladesh, and Pakistan will be granted citizenship status of India. The Indian society then rejected the CAA 2019 because it was considered discriminatory against Muslims, the Indian government which should be able to deal with the masses more openly, in fact the Indian government prefers to take repressive actions to silence them. This action attracted the attention of Amnesty International as a human rights organization. In this case make a question of how Amnesty International's response to the government's repressive actions related to the rejection of the Citizenship Amendment Act in India in 2019. The type of research used in this study is a descriptive type with primary data sources in the form of a policy law on citizenship and secondary sources in the form of literature-literature related to this research topic. Then, to explain the research question, the concept of the Transnational Advocacy Network was used. The results of this study indicate that Amnesty International respond to the government's repressive actions related to the refusal of the CAA 2019, that is: Conducting research and distributing information related to the government's repressive actions related to the refusal of the CAA 2019, conducting a campaign action by inviting the wider community to immediately release an activist Human rights, namely Safoora Zargar who has been arrested under repressive laws and lastly Amnesty International calls for accountability to reaffirm India's determination as a signatory country to the ICCPR where India is a party to respect all international human rights standards.*

Keywords: Amnesty International, Citizenship Amendment Act, India.

Pendahuluan

India merupakan tempat bagi para imigran baik legal maupun ilegal, para imigran yang masuk ke negara tersebut sebagian besar didominasi oleh orang- orang dari negara Pakistan, Pakistan timur (sekarang menjadi negara Bangladesh) dan Afghanistan. Imigran Pakistan menetap secara ilegal ke wilayah India bagian timur seperti di Assam dan sudah berlangsung sejak perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan di tahun 1971 (Rashid, 2011). Sementara para imigran dari Afghanistan datang ke India awalnya sejak Invasi Soviet 1979 yang mana terjadi konflik militer yang menyebabkan para warga setempat terpaksa mengungsi ke wilayah bagian India yaitu Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Delhi(CIA.gov, 2020).

Terkait keberadaan imigran ilegal ini, pemerintah India telah mengatur siapa saja yang dapat memperoleh status kewarganegaraan India, yaitu pada *Citizenship Act 1955 (CA 1955),* dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa, terdapat 5 cara untuk menjadi warga negara India yaitu : Pertama, ,jika mereka lahir di India. Kedua, jika orang tersebut merupakan keturunan India. Ketiga, dengan

[1] Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. E-mail : nurfatimah2648@gmail.com.

melakukan registrasi. Keempat, melalui jalur naturalisasi yang mana seseorang diberikan sertifikat naturalisasi jika orang tersebut bukan imigran ilegal dan telah tinggal di India selama 11 tahun. Dan yang kelima adalah jika orang tersebut merupakan penduduk dari wilayah baru yang menjadi bagian dari India(Egazette, 1955).

Namun pada tanggal 9 Desember 2019, Amit shah sebagai menteri dalam negeri India, yang juga seorang ketua umum Partai Bharatiya Janata (*BJP*) mengajukan amandemen *CA 1955* yang dinamakan *Citizenship Amendment Act* 2019 (*CAA 2019),* amandemen ini bertujuan akan membebaskan kelompok imigran ilegal tertentu yang mengalami penganiayaan agama di negara asalnya dari sanksi atas ditahan dan deportasi, kelompok-kelompok ini adalah imigran ilegal yang menganut agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari 3 negara berikut, yaitu : Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang tiba di India sebelum 31 Desember 2014, terlebih lagi imigran legal ini diberi kemudahan untuk mendapatkan status kewarganegaraan dengan jalur naturalisasi yang singkat dengan syarat masa tinggal di India menjadi 5 tahun yang sebelumnya tidak bisa diakses mereka(Egazette, 2019).

Setelah diresmikannya *CAA 2019* pada tanggal 12 Desember 2019 oleh parlemen India, kebijakan tersebut pun banyak menuai reaksi negatif masyarakat India, seperti aksi protes dalam jumlah besar yang melibatkan para pembela hak, aktivis politik, jurnalis, pelajar, dan para akademisi. Aksi protes ini bermula dari wilayah Assam, yang mana kebijakan *CAA 2019* dianggap bertentangan dengan perjanjian *Assam Record* yang telah disepakati oleh Pemerintah India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Indira Gandhi dengan *All Assam Student Unioun* juga *All Assam Gana Sangram Parishad* pada tahun 1985. *Assam Accord* ini berisikan perjanjian yang menyepakati tentang identifikasi imigran illegal yang menjadi warga negara India, dengan syarat jika mereka datang ke India sebelum atau pada tanggal 25 Maret 1971 tanpa menjadikan agama dan dari negara tertentu sebagai pertimbangan untuk menjadi warga negara India. Sementara pada *CAA 2019* ini, lebih memberikan ruang yang lebar kepada imigran ilegal dari negara tetangga yaitu Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan dengan melonggarkan batas waktu pemberian kewarganegaraan. Berdasarkan hal tersebutlah yang menyebabkan mereka yang menentang penerapan undang-undang di Assam khawatir akan perubahan demografis yang besar sebab pemberian status kewarganegaraan kepada imigran ilegal dari 3 negara tersebut yang dapat berdampak pada tergerusnya budaya India (Pisharoty, 2019).

Selain di Assam, menjelang pemilihan Majelis Legislatif di Delhi, yang diadakan pada 8 Februari 2020, beberapa pemimpin politik membuat pidato kebencian yang bersifat provokatif terhadap para pengunjuk rasa anti-*CAA 2019*. Seperti yang terjadi pada tanggal 27 Januari 2020, di Shaheen Bagh, dimana daerah tersebut merupakan pusat aksi demo di Delhi terhadap *CAA 2019*, Menteri Keuangan India yaitu Anurag Thakur yang juga merupakan anggota partai *BJP*, pada saat memimpin massa yang mendukung *CAA 2019* diwilayah itu, ia mendorong massa untuk meneriakkan "tembak para pengkhianat bangsa" yang jelas seruan tersebut ditujukan kepada para pengunjuk rasa anti-*CAA 2019*. Terdapat pula pada 28 Januari 2020, Parvesh Verma, anggota parlemen dari Partai *BJP* mengklaim bahwa para pengunjuk rasa anti-*CAA 2019* dari Shaheen Bagh akan memasuki rumah warga dan memperkosa saudara perempuan, anak perempuan anda dan membunuh mereka. Dalam pidato lain

di hari yang sama, dia berjanji untuk tidak membiarkan satu pun masjid berdiri setelah kemenangan pemilihan *BJP* di Delhi(Amnesty, 2020). Dilihat dari tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah India inilah yang kemudian menarik perhatian *Amnesty International,* yang merupakan lembaga internasional yang aktif berupaya melindungi HAM secara global, dimana organisasi ini mulai menyoroti kasus pelanggaran HAM di India sejak tahun 1966 menilai bahwa tindakan tersebut melanggar standar hak asasi manusia internasional. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk meneliti Respon *Amnesty International* terhadap tindakan represif pemerintah terkait penolakan *Citizenship Amendment Act* di India Tahun 2019.

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan konsep jaringan advokasi transnasional untuk membantu menjelaskan masalah pembahasan dalam penelitian.

Konsep Jaringan Advokasi Transnasional *(Transnational Advocacy Network Concept)*

Jaringan Advokasi Transnasional adalah aktor-aktor yang bekerja pada suatu isu dalam skala internasional, aktor-aktor ini disatukan melalui nilai-nilai bersama dan pertukaran informasi, para aktor-aktor ini bekerja sama secara terorganisir untuk mengangkat isu dan norma - norma atau fenomena baru (Keck dan Sikkink, 1998).

Keck dan Sikkink mengklasifikasikan jaringan advokasi transnasional ini menjadi tujuh aktor yaitu: *NGO (Non-Governmental Organizations)* yang berskala nasional maupun internasional, *Local Social Movements,* yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan *intergovernmental,* serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. Tidak butuh semua aktor-aktor ini untuk membentuk Jaringan Advokasi Transnasional, hanya sejumlah kecil aktor psun, sebuah Jaringan Advokasi Transnasional dapat terbentuk dan dijalankan (Keck dan Sikkink, 1998).

Namun, aktor *TAN (Transnational Advocacy Network)* seringkali kesulitan untuk memasuki kancah politik domestik suatu negara. Karena alasan itulah mereka menggunakan koneksi dari jaringan internasional untuk membantu persoalan yang sedang dihadapi, dari situlah akan terbentuk pola hubungan yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai *"Boomerang pattern",* dimana para aktor *TAN* akan memilih langkah-langkah alternatif dengan membangun jaringan dengan aktor internasional lain untuk mencari dukungan dan memperjuangkan masalah yang mereka promosikan dan mempengaruhi pemerintah dari luar. Untuk melaksanakan hal ini, Keck dan Sikkink membagi 4 cara yang dapat digunakan aktor *TAN*, yaitu (Keck dan Sikkink, 1998):

a. *Information Politics,* yaitu kemampuan pada aktor jaringan advokasi untuk mencari, mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan informasi yang kredibel guna dapat memberikan pengaruh yang besar kepada publik. Sebab, informasi itu penting untuk menyatukan keanggotaan kelompok dan menciptakan keefektifan kerja dalam suatu jaringan.

b. *Symbolic Politics,* yaitu merupakan kemampuan untuk memberikan kesan yang kuat dengan menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita yang menggambarkan isu yang diangkat untuk dibawa kepada masyarakat luas. Hal ini merupakan bagian dari proses persuasi dimana jaringan bertujuan untuk

menciptakan pemahaman publik akan sebuah isu yang diangkat sehingga menghasilkan kesadaran dan memperluas pendukungnya.

c. *Leverage Politics,* yaitu kemampuan aktor jaringan advokasi untuk mendapatkan dukungan para aktor yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat luas, sehingga mampu memperkuat pergerakan yang dilakukan oleh anggota jaringan tersebut. Aktor yang ditargetkan yaitu aktor-aktor yang berpotensi dapat dengan mudah merubah kebijakan suatu isu yang sedang aktor perjuangkan. Dalam mewujudkan perubahan tersebut, aktor jaringan harus pandai untuk membujuk dan menekan pelaku aktor atau institusi yang memiliki kekuatan tersebut.

d. *Accountability Politics,* yaitu aktor jaringan advokasi berusaha untuk meyakinkan atau mengikat pemerintah atau aktor-aktor lain yang ditargetkan agar tetap konsisten terhadap apa yang telah mereka dukung sebelumnya sesuai dengan Prinsip kebijakan formal yang telah mereka lakukan. Misal, mulanya pemerintah atau aktor-aktor target berkomitmen untuk mendukung hak asasi manusia atau demokrasi, maka tugas dari aktor jaringan transnasional tersebut adalah untuk mengontrol dan mengomando mereka terhadap praktik yang diterapkan dari apa yang telah diwacanakan sebelumnya. Cara seperti ini dapat dijadikan sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk mempermalukan pemerintah yang mencoba untuk tidak peduli terhadap isu-isu yang sedang diangkat dan diperdebatkan tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dimana penulis mencoba menggambarkan bagaimana respon *Amnesty International* terhadap tindakan represif pemerintah terkait penolakan *Citizenship Amendment Act* di India pada tahun 2019 yang telah disahkan di India. Jenis data yang digunakan adalah data data primer dalam bentuk Undang-undang kebijakan tentang kewarganegaraan atau *Citizenship Amendment Act (CAA)* Tahun 2019 dan sumber-sumber sekunder berupa literatur-literatur seperti buku-buku, situs internet, artikel, dan lain-lain terkait dengan objek penelitian yang kemudian diolah menjadi bahan yang digunakan untuk menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research)*. Teknik ini mengarahkan penulis pada perolehan data atau literatur yang relevan seperti buku - buku, surat kabar, internet dan berbagai publikasi lainnya yang merupakan data sekunder dari penelitian ini. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif, yaitu, dalam menganalisis permasalahan digambarkan berdasarkan data-data yang ada lalu menghubungkan data yang satu dengan data yang lain sesuai dengan masalah yang diteliti pada penelitian ini demi mendukung permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Pada tanggal 9 Desember 2019, Amit shah sebagai menteri dalam negeri India, yang juga seorang ketua umum Partai Bharatiya Janata (*BJP*) mengajukan untuk mengamandemen cara mendapatkan status warga negara yang terdapat pada *Citizenship Act 1955,* amandemen tersebut bertujuan akan membebaskan kelompok imigran ilegal yang menganut agama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi, dan Kristen dari negara

Afghanistan, Bangladesh, dan Pakistan yang mengalami penganiayaan agama di negara asalnya dari sanksi atas dipenjara dan diderpotasi, terlebih lagi imigran legal ini diberi kemudahan untuk mendapatkan status kewarganegaraan dengan jalur naturalisasi yang sebelumnya tidak bisa diakses mereka. Namun, setelah diresmikannya *amandemen ini*, kebijakan tersebut pun banyak menuai reaksi negatif masyarakat India, mereka khawatir akan perubahan demografis yang besar sebab banyaknya imigran ilegal tersebut yang akan mengancam bahasa, budaya dan tradisi asli mereka. Namun bukannya menerima kritikan yang membangun dari pemrotes, pemerintah lebih memilih melakukan tindakan represif untuk membubarkan mereka seperti menggunakan senjata api untuk menembak ataupun menangkap secara paksa para pemrotes. Tindakan represif tersebut pun membuat *Amnesty International,* menilai bahwa tindakan tersebut melanggar standar hak asasi manusia internasional. Berikut respon *Amnesty International* terhadap tindakan represif pemerintah terkait penolakan *Citizenship Amendment Act* di India tahun 2019 sesuai dengan 3 dari 4 cara untuk mewujudkan advokasi yang terdapat dalam konsep *TAN* yaitu *Information Politics, Symbolic Politics d*an *Accountability Politics:*

A. Advokasi melalui *Information Politics*

Amnesty International menentang tindakan represif pemerintah terkait penolakkan *CAA 2019* di India dengan cara melakukan riset dan distribusi informasi atas isu tersebut dengan tujuan untuk membuka wawasan kepada publik atas apa yang terjadi pada keadaan hukum di India yang sebenarnya saat setelah *CAA 2019* diresmikan. Dengan adanya riset dan distribusi informasi kepada masyarakat luas dari *Amnesty International*, hal ini akan membuat pengaruh besar terhadap bagaimana opini publik mengenai tindakan represif pemerintah terkait penolakkan *CAA 2019* di India sesuai dengan apa yang *Amnesty International* temukakan. Sehingga, dengan mudah organisasi ini akan mendapat dukungan baik dari individu, warga negara India maupun pihak lain yang terlibat dalam isu -isu HAM. Hal yang dilakukan *Amnesty International* ini sesuai dengan strategi TAN yakni *Information Politics* yaitu kemampuan untuk secara akurat mengelola informasi penting sehingga informasi yang didapat menghasilkan pengaruh yang besar.

Dalam riset yang disebarkan dalam laman websitenya oleh *Amnesty International* terkait penentangan terhadap tindakan represif pemerintah terkait penolakkan *CAA 2019* di India di situs resmi tersebut, *Amnesty International* melakukan Investigasi di India yaitu dengan mendokumentasikan kebrutalan polisi pada saat aksi protes anti-*CAA 2019* berlangsung di ibu kota Delhi dan pidato kebencian yang dibuat oleh politisi anggota Partai Bharatiya Janata (*BJP*) yang bernama Kapil Mishra di Delhi. Tidak hanya itu, *Amnesty International* lebih lanjut mendokumentasikan bagaimana tindakan polisi Delhi yang seharusnya mencegah kekerasan namun nyatanya ikut berpartisipasi aktif dalam kekerasan yaitu dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan dan sewenang-wenang terhadap pengunjuk rasa (Amnesty Usa, 2020).

Untuk memverifikasi bukti-bukti pelanggaran hak asasi manusia dalam video media sosial yang dibuat pengguna selama kekerasan, *Amnesty International* India bekerja sama dengan *Crisis Evidence Lab Amnesty International,* yaitu Lab yang menggunakan sumber terbuka dan alat investigasi digital mutakhir untuk menguatkan

dan menganalisis pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam kasus pelanggaran HAM dalam video media sosial, lab ini membuktikan kebenarannya dengan memverifikasi waktu, tanggal, dan lokasi video. Selain itu, *Amnesty International* India mengunjungi lokasi pengambilan video dan mewawancarai para saksi mata dan penyintas. Dalam salah satu dari beberapa video yang dianalisis oleh *Crisis Evidence Lab Amnesty International*, petugas polisi Delhi terlihat menendang dan memukul sekelompok lima pria yang terluka pada tanggal 24 Februari 2020 yang lalu pada saat aksi protes anti-*CAA 2019* berlangsung di ibu kota Delhi, terlihat petugas polisi menodong dan menusuk mereka dengan senapan dan meminta mereka menyanyikan lagu kebangsaan India. Setelah video itu diambil, orang-orang itu ditangkap dan ditahan (Amnesty Usa, 2020).

Amnesty International India menganalisis rekaman video tersebut dan berbicara dengan ibu dari Faizan yang berusia 26 tahun yang merupakan salah satu pria dalam video tersebut, Dari informasi selanjutnya yang diperoleh dari ibu Faizan yang bernama Kismatun, Faizan ditahan oleh polisi selama hampir 36 jam tanpa dakwaan apapun. Faizan diserahkan kepada beliau setelah kondisinya memburuk dan polisi menolak memberikan dokumen apa pun kepada keluarga untuk menunjukkan bahwa dia telah ditahan (Amnesty Usa, 2020).

Dari kasus tersebut, diketahui perlakuan kejam dengan menyebabkan orang terluka parah yang dilakukan oleh polisi Delhi melanggar Pasal 9 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) di mana India adalah salah satu negara yang meratifikasi konvenan tersebut tepatnya tanggal 10 April 1979. Isi pasal 9 tersebut berisikan :

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

2. Siapa pun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum(OHCR,1996).

Polisi Delhi juga melanggar hukum India sendiri dengan tidak mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam *The Code Of Criminal Procedure*, yang merupakan pedoman untuk mencegah penyalahgunaan dan penyiksaan penahanan. Terdapat 3 pasal yang dilangar oleh polisi Delhi, yaitu : Pada *Section* 41B dari *The Code Of Criminal Procedure* yang meminta identifikasi oleh polisi saat melakukan penangkapan dan persiapan memo penangkapan dengan tanggal dan waktu penangkapan yang ditandatangani oleh saksi independen dan ditandatangani oleh orang yang ditangkap. Ini juga menyatakan bahwa anggota keluarga atau teman harus diberitahu tentang penangkapan orang tersebut bersama dengan tempat penahanan mereka(Latest Laws, 2020). kemudian pada *Section* 54 bahwa orang-orang yang ditangkap harus diperiksa kesehatannya setelah ditahan(Indian Kanoon, 1973). dan yang terakhir pada *Section* 57, dimana dalam *The Code Of Criminal*

Procedure juga mengharuskan polisi untuk menunjukkan setiap orang yang ditangkap di hadapan hakim dalam waktu 24 jam (Indian Kanoon, 1973).

Di lain sisi, *Amnesty International* di India juga menganalisis peran yang dimainkan oleh politisi yang membuat pidato provokatif dalam membangun kekerasan dan kebencian terhadap pengunjuk rasa anti-*CAA 2019* yang terjadi pada 23 Februari 2020 yang lalu, dimana seorang anggota partai *BJP* yaitu Kapil Mishra melakukan pidato yang menentang protes anti-*CAA 2019* di Jaffrabad di Delhi Timur Laut. Dalam pidatonya, ia memberi polisi Delhi ultimatum tiga hari yang disiarkan langsung untuk menyingkirkan para pengunjuk rasa di wilayah tersebut (Amnesty Usa, 2020).

B. Advokasi melalui *Symbolic Politics*

Dalam menerapkan *Symbolic Politics,* yang merupakan kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol, tindakan-tindakan atau cerita yang dapat mewakili dan menggambarkan sebuah isu yang diangkat untuk dibawa kepada masyarakat luas, pada tanggal 1 Mei 2020 *Amnesty International* berkampanye melalui media sosial *twitter* (Amnesty India, 2020).

Dalam kampanye tersebut, *Amnesty International* mencoba mengajak masyarakat luas dalam skala Internasional untuk segera membebaskan Safoora Zargar yaitu seorang mahasiswa dari Universitas Jamia Millia yang sedang hamil tiga bulan, ia yang ditangkap oleh Polisi Delhi pada 10 April dan selanjutnya didakwa di bawah *Unlawful Activities Prevention Act (UAPA*) yang merupakan Undang-undang pencegahan aktivitas yang dapat membahayakan integritas negara India, dengan UU ini Safoora dituduh sebagai sebagai dalang utama yang menyebabkan kerusuhan para pemrotes anti-*CAA 2019* pada 23 Februari 2020 di Delhi, Safoora ditahan di Penjara Tihar, salah satu penjara paling penuh sesak di India dan tempat dimana meskipun narapidana dinyatakan positif COVID-19 tetap di penjara, ia ditahan disana hingga 180 hari (Amnesty Usa, 2020).

Sangat memprihatinkan untuk berpikir bahwa pemerintah terus menggunakan undang-undang yang represif untuk menahan aktivis HAM dan lebih jauh lagi menempatkan hidup bayi yang terdapat dalam kandungan seorang ibu seperti Safoora dalam risiko besar. Sehingga, *Amnesty International* melakukan kampanye sosial ini dengan mengajak seluruh masyarakat Internasional untuk menggunakan slogan "Free Safoora" di media sosial *Twitter* yang memuat pesan yang ditujukan kepada Kementrian Dalam Negeri India (Amit Shah) untuk segera meninjau kembali kasus penahanan pra-sidang dan segera membebaskan Safoora Zargar yang telah ditangkap di bawah undang-undang yang represif karena menggunakan hak beliau atas kebebasan berekspresi dan mencabut atau mengubah undang-undang yang memberlakukan pembatasan sewenang-wenang atau menyeluruh terhadap hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi (Amnesty Usa, 2020).

C. Advokasi melalui *Accountability Politics*

Accountability politics, adalah cara aktor jaringan advokasi berusaha untuk meyakinkan atau mengikat pemerintah atau aktor-aktor lain yang ditargetkan agar tetap konsisten terhadap apa yang telah mereka dukung sebelumnya sesuai dengan prinsip kebijakan formal yang telah mereka lakukan. Dengan demikian, cara tersebut dapat

dijadikan sebagai alat yang bisa dipergunakan untuk mempermalukan pemerintah yang mencoba untuk tidak peduli terhadap isu-isu yang sedang diangkat dan diperdebatkan tersebut. Dalam hal ini, *Amnesty International* telah merilis "*Amnesty International India Investigative Briefing* " yaitu sebuah laporan yang mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah India terhadap protes anti-*CAA 2019* (Amnesty Usa, 2020).

Mengenai situasi HAM di India, *Amnesty International* mengecam negara tersebut atas penanganannya terhadap protes anti-*CAA 2019* terutama yang terjadi di Delhi. Selain itu, *Amnesty International* juga menuntut pertanggungjawaban atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah India selama kerusuhan di Delhi yang melanggar Pasal 20 dan 21 pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (OHCHR, 1996).

Pada pasal 20 (2) *ICCPR* mengatakan:

> *"Segala tindakan advokasi yang menganjurkan kebencian atas dasar Kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum".*

Amnesty International memberikan bukti pelanggaran pada pasal tersebut dengan menyebutkan tiga politikus dari partai *BJP yang* menyuarakan ujaran kebencian dan menyerukan kekerasan kepada pengunjuk rasa anti-CAA *2019*, yang pertama yaitu : Kapil Mishra dimana pada 23 Februari 2020 yang lalu ia melakukan pidato yang menentang protes damai di Jaffrabad di Delhi Timur Laut. Dalam pidatonya, ia memberi polisi Delhi ultimatum tiga hari yang disiarkan langsung untuk menyingkirkan para pengunjuk rasa di wilayah tersebut (Amnesty, 2020).

Kedua, seorang Menteri Keuangan India yang juga merupakan anggota partai *BJP* yaitu Anurag Thakur , dimana pada tanggal 27 Januari 2020 yang lalu ia memimpin massa yang mendukung *CAA-2019* di Shaheen Bagh untuk mendorong mereka meneriakkan "tembak para pengkhianat bangsa" yang jelas seruan tersebut ditujukan kepada para pengunjuk rasa anti-*CAA 2019*. Dan yang ketiga yaitu Parvesh Verma, anggota parlemen dari Partai Bharatiya Janata (BJP) pada 28 Januari 2020 yang lalu ia mengklaim bahwa para pengunjuk rasa anti-*CAA 2019* dari Shaheen Bagh akan memasuki rumah warga dan memperkosa saudara perempuan, anak perempuan anda dan membunuh mereka. Dalam pidato lain di hari yang sama, dia berjanji untuk tidak membiarkan satu pun masjid berdiri setelah kemenangan pemilihan BJP di Delhi (Amnesty, 2020).

Berikutnya terdapat Pasal 21 *ICCPR* yang mengatakan:

"Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain".

Amnesty International mengungkapkan seharusnya India yang sebagaimana negara yang berpihak pada *ICCPR* mengakui hak tak terbatas untuk berkumpul secara damai serta perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Namun senyatanya pemerintah India melanggarnya dengan menerapkan larangan selama tiga hari untuk berkumpul lebih dari lima orang yang diberlakukan di Bengaluru dari 19 sampai 21 Desember 2019, larangan ini dimulai dari pukul 06:00 pada hari kamis dan berlanjut hingga sabtu tengah malam, larangan tersebut diberlakukan berdasarkan pasal 144 dari *The Code Of Criminal Procedure* (CRPC) sebagaimana yang dikatakan oleh Bhaskar Rao yang merupakan Komisaris Polisi dari wilayah Bengaluru. Namun, Pengadilan tinggi Karnataka yaitu hakim ketua Abhay Oka dan hakim Hemant Chandangoudar menyatakan bahwa pengenaan perintah larangan atas perintah Bhaskar Rao itu sebagai ilegal sebab tidak memenuhi uji pengawasan yudisial(Business Standard, 2020).

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka *Amnesty Internasional* meminta pertanggungjawaban untuk menegaskan kembali tekad India sebagai negara yang menandatangani *ICCPR* untuk menghormati, melindungi dan memenuhi semua hak asasi manusia dan seharusnya dalam menghadapi massa lebih terbuka dan mempertimbangkan kembali tuntutan para pemrotes *CAA-2019* daripada berusaha untuk mengintimidasi dan membungkam hak kebebasan berpendapat mereka.

Kesimpulan

Amnesty International dalam merespon tindakan represif pemerintah India terkait penolakkan CAA di India tahun 2019 melakukan berbagai tindakan advokasi yang merupakan cerminan 3 dari 4 cara dalam mewujudkan tujuan advokasi menurut Keck dan Sikkink, mulai dari menggunakan cara *Information politics* yaitu dengan melakukan riset dan distribusi informasi terkait adanya tindakan represif pemerintah terkait penolakan *Citizenship Amendment Act* Di India Tahun 2019, S*ymbolic politics* dengan melakukan sebuah aksi kampanye yaitu mengajak masyarakat luas dalam skala Internasional untuk segera membebaskan seorang aktivis HAM yaitu Safoora Zargar yang telah ditangkap di bawah undang-undang yang represif dan meminta kepada pemerintah India untuk mencabut atau mengubah undang-undang yang memberlakukan pembatasan sewenang-wenang atau menyeluruh terhadap hak asasi manusia atas kebebasan berekspresi dan yang terakhir *Accountability politics* dengan meminta pertanggungjawaban untuk menegaskan kembali tekad India sebagai negara yang menandatangani *ICCPR* dimana India menjadi negara yang berpihak untuk menghormati, melindungi dan memenuhi semua standar hak asasi manusia internasional.

Namun, dari respon-respon yang dilakukan oleh *Amnesty International* tersebut tetap tidak dapat mengubah keputusan pemerintah India dalam menerapkan kebijakan *Citizenship Amendment Act 2019 (CAA 2019),* Hal tersebut dikarenakan bahwa pemerintah India menganggap *CAA 2019* ini adalah permasalahan internal dan tidak ada pihak asing dari luar yang dapat memiliki kedudukan dalam masalah yang berkaitan dengan India.

Daftar Pustaka

Amnesty USA. "Amnesty International India Investigative Briefing", 2020, https://www.amnestyusa.org/wpcontent/uploads/2020/08/Investigative-Briefing.pdf , diakses pada 25 Maret 2021.

Amnesty, 2019, "Amnesty International India", Tersedia di terdapat https://amnesty.org.in/ di diakses pada 21 September 2021.

Amnesty, 2020,"India: International Community Must Condemn Crimes Against Peaceful Protesters" Tersedia di https://www.amnesty.org.au/india-states-must-condemn-human-rights-violations-against-peaceful-protesters/ diakses pada 3 Maret 2021.

Amnesty,2021,"India 2021", Tersedia di https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/south-asia/india/report-india/, diakses pada 1 September 2021.

Amnesty. "The Amnesty International Timeline", 2021, https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/act300182011en.pdf, diakses pada 1 Oktober 2021.

Ar-Rashid, M. H. "Let us Prove that Past is Past Indian Foreign Affairs Journal", Vol.6, No.4, pp. 380, 2011, https://www.foreignaffairs.com/articles/india/2021-03-18/dLet us- Prove - that -Past -is- Past, diakses pada 23 Mei 2021.

Business Standard, 2020, "CAA protests: Section 144 in Bengaluru was illegal, says Karnataka HC" Tersedia di https://www.business-standard.com/article/news-ani/karnataka-high-court-holds-imposition-of-sec-144-on-bengaluru-as-illegal-120021400075_1.html diakses pada 25 Februari 2021.

CIA Gov. "World Factbook",2021,https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html, diakses pada 22 Desember 2020.

Egazette. "The Citizenship Act", 1955, Tersedia di http://egazette.nic.in/WriteReadData/1955/E-2210-1955-0023-101599.pdf, diakses pada 29 April 2020.

Egazette. "The Gazette of India", 2019, . https://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/214646.pdf, diakses pada 29 April 2020.

Indian Kanoon. "Section 124A in The Indian Penal Code",2012, https://indiankanoon.org/doc/1641007/ diakses pada 3 Maret 2021.

Keck, Margareth & Sikkink, Kathryn. 1998. *Activist Beyond Border: Advocacy Networks in International Politics.* New York: Cornell University Press.

Latest Laws, 2020,"CrPC Section 41B, Procedure of arrest and duties of officer making arrest" Tersedia di https://www.latestlaws.com/bare-acts/central-acts-rules/crpc-section-41b-procedure-of-arrest-and-duties-of-officer-makingarrest#:~%20the%20person%20arrested,be%20informed%20of%20his%20arrest. diakses pada 5 Juli 2021.

OHCHR. "General discussion on GC on Article 9" , 1996, https://www.ohchr.org/en/hrbodies/ccpr/pages/gconarticle9.aspx diakses pada 3 September 2021.

Pisharoty,Sangeeta Barooah. 2019. *Assam : The Accord, The Discord.* Delhi : Penguin Random House India Private Limited.Rajan,Irudaya & Sumeetha. 2019. *Internal Migration In India.*Thiruvananthapuram: Sage Publications Pvt. Ltd.